Bab V

Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, maupun itu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah baik itu Gubernur atau Walikota atau Bupati partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan dalam penyelenggaran Pemilihan Umum. Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan, dijelaskan dalam pemenuhan hak pilih warga binaan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Depok tahun 2020, warga binaan dapat menggunakan hak pilih nya pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Kota Depok tahun 2020 selama warga binaan tersebut terdaftar pada Data Pemilih Tetap (DPT) atau terdata pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan Pendataan di Rutan Kelas 1 Depok. Dalam peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa warga negara diberikan persamaan dan fasilitas yang sama dalam urusan pemerintahan, ada beberpa faktor yang menyebabkan warga binaan tidak dapat menggunakan hak pilih nya. Seperti warga binaan tidak terdata pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan pendataan, atau mungkin sedang dalam kondisi

kurang sehat, serta dari diri pribadi nya memang tidak ingin menggunakan hak pilih nya.

Dan faktor yang mempengaruhi warga binaan dalam berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, karena motivasi dari warga binaan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak pilih nya, dan juga memiliki kesadaran politik yang dimana wargab binaan tersebut memang selalu paham dengan perkembangan politik yang mereka ketahui, dan tentu nya punya kesenangan sendiri setelah itu berpartisipasi dan ikut menggunakan hak pilih nya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok pada dasarnya bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 berjalan dengan kondusif dan aman, sehingga mengalami peningkatan partisipasi warga binaan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun sebelum nya tingkat partisipasi warga binaan sebesar 56,00% dan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 tingkat partisipasi warga binaan sebesar 62,80% itu melebihi target yang sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok menyediakan 2 Tempat Pemungutan Suara

(TPS) di Rutan Kelas 1 Depok dan tiap TPS peningkatan nya cukup tinggi, seperti di TPS pertama sebesar 79,03 dan di tps kedua sebesar 79,80 itu melebihi apa yang di targetkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) nya.

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok bependapat atas upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan di Rutan Kelas 1 Depok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 sudah sangat baik, dimulai saat pemutakhiran data pemilih, dan juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Disdukcapil untuk melakukan proses pendataan warga binaan yang dapat berpartisipasi dan dapat menggunakan hak pilih nya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Depok tahun 2020, bagaimana seperti yang diketahui bahwa warga binaan ada yang tidak memiliki identitas (tidak memiliki ktp) sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Bekerja sama dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman data ulang, terlepas dari itu semua yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota depok dari mulai pendataan, kemudian sosialisasi, hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Depok tahun 2020 semua berjalan dengan baik dan lancar.

Kemudian pandangan menurut Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan Cilodong, berpendapat bahwa dari dimulai nya

kegiatan sosialisasi yang sebagaimana adalah pokok utama sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, tekait tahapan-tahapan Pemilihan Umum, Pendataan, Pelaksanaan, dan mekanisme Pemungutan suara pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020. Visi misi calon Kepala Daerah, siapa calon kepala daerahnya, itu juga harus di sosialisasikan agar warga binaan mengetahui siapakah calon kepala daerah Kota Depok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Depok tahun 2020 tetapi yang menyampaikan itu adalah tim dari masing-masing pasangan calon kepala daerah, karena PPS hanya memfasilitasi untuk akses ke dalam Rutan tersebut, karena tidak bisa sembarangan orang bisa keluar masuk ke dalam Rutan tersebut,

Dan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 di Rutan Kelas 1 Depok berjalan dengan baik, walaupun pelaksanaan tersebut masih pada masa Pandemi Covid-19, walaupun keterbatasan interaksi anatara PPS dengan warga binaan karena masa pandemi tersebut, tetapi PPS selalu berkoordinasi dengan calon tim Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) karena yang terlibat dari tim kpps adalah petugas rutan tersebut. Dan pelaksanaan tersebut juga sesuai dengan apa yang di targetkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Secara keseluruhan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok berjalan dengan baik dan aman, dan partisipasi

politik warga binaan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan di banding dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Walaupun masih banyak warga binaan yang tidak menggunakan hak pilih nya, walaupun dia mendpaatkan hak pilih nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok patut bersyukur dan mengapresiasikan atas partisipasi warga binaan yang masih ingin menggunakan hak pilih nya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020.

UNIVERSITAS NASIONAL